

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan dengan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan antara ukuran nasional, *Gross Nasional Product* (GNP) pada tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan alam dan teknologi, faktor budaya serta faktor daya modal.

Pengeluaran Pemerintah adalah suatu kebijakan fiskal untuk mengatur suatu jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan ataupun pengeluaran pemerintah pada tiap tahunnya. Yang dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah nasional. Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk wilayah daerah ataupun regional. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output ataupun kesempatan kerja dan untuk mendorong suatu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sangat tinggi dan dapat dilihat dari sisi Pengeluaran seperti meningkatnya konsumsi swasta, khususnya dalam konsumsi rumah tangga serta investasi. Berikut ini adalah Pertumbuhan Ekonomi Se Jawa Tengah pada tahun 2013-2017 :

Tabel 1.1 Dalam Bentuk Juta Rupiah

Tahun	PDRB
2013	12730236616
2014	16846898289
2015	17547686334
2016	22626201874
2017	235791000000

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang telah dialokasikan bertujuan untuk pemerataan dalam kemampuan keuangan dari daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam suatu pelaksanaan desentralisasi di dalam UU Nomer 33 Tahun 2004. Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum yang mempunyai tujuan untuk pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat di perkecil (Indarti dan Sugiartiana, 2012). Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan telah di atur dalam UU 32/2004. Dana Alokasi Umum merupakan dana hibah (*grants*) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima (Arwati dan Hadiati, 2013). Permasalahan dalam suatu Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan dengan cara pandang dari pemerintah pusat dan daerah. Bagipusat Dana Alokasi Umum dijadikan sebagai instrument *horizontal imbalance*. Bagi

daerah Dana Alokasi Umum yang dimaksud adalah untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum yang besar atau sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai suatu kegiatan khusus berupa urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam rancangan suatu APBN. Dasar hukum yang berlaku pada Dana Alokasi Khusus yaitu di dalam Undang-Undang No.33 pada Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.55 pada Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomer 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Keuangan ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus sedangkan pada tingkat inflasi menunjukkan tingkat presentase perubahan tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam, dalam sebagian besar dari harga-harga barang tersebut yang selalu meningkatkan dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Inflasi murni adalah inflasi yang terjadi sebelum adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Yang berupa kebijakan fiscal maupun kebijakan moneter. Dalam suatu laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode keperiode ataupun dari tahun ketahun.

Penulis ingin mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Dalam Sektor Pengeluaran di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa**

Tengah Pada Tahun 2013-2017”. Berdasarkan hal tersebut di atas cukup menarik untuk di teliti maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian. DAU, DAK dan Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. Peneliti ingin mengetahui kondisi perekonomian pada Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2013-2017.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengeluaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis DAU, DAK dan Inflasi pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam penelitian ini dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap para peneliti selanjutnya dan dapat membandingkan penelitian yang akan dilakukan antara penelitian dimasa lalu dengan masa yang akan datang sehingga bisa memberikan perubahan yang kearah lebih baik lagi.

3. Dengan adanya penelitian ini Pemerintah bisa memberikan pengaruh dalam berbagai masukan dalam penentuan suatu kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah seperti upaya peningkatan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini akan membahas tentang unsur-unsur penelitian yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Bab ini juga berisi teori-teori yang mendasari dilakukannya penelitian variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan hipotesis mengenai penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini akan membahas tentang jenis dan sumber data, menjelaskan tentang variabel-variabel yang akan digunakan agar bisa mengoperasionalkan di dalam penelitian dan membahas tentang metode analisis yang di gunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan membahas tentang data penelitian, menyajikan hasil penelitian, analisis data dan pembahasandarianalisis data. Bab ini juga membahas semua temuan-temuan dari hasil penelitian analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Di dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada bagian bab sebelumnya. Simpulan ini juga harus telah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan implikasi sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga pada bab ini dapat ditarik dari implikasi teoritis dari penelitian ini.

